



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Birobuli Selatan

Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Birobuli Selatan Village

Ravika Rismawati^{1*}, Rita Yunus², Yunus Sading³, Santi Yunus⁴, Yohan⁵

¹⁻⁵Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

*Corresponding author : Email: rvkrismawati@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Keluarga Penerima Manfaat,
Bantuan Pangan Non Tunai

Keywords:

Beneficiary Families, Non-
Cash Food Assistance

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8343](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8343)

ABSTRAK

BPNT ditujukan untuk mengurangi tingkat pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberi nutrisi seimbang, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mendorong usaha eceran rakyat dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya mendapatkan karbohidrat saja tetapi juga protein. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kelurahan Birobuli Selatan menerapkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan telah dilakukan secara umum sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018, yaitu dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi, registrasi, dan penyaluran. Perubahan Kementerian Sosial sudah tidak lagi memberikan bantuan sosial dalam bentuk balok melainkan uang tunai yang sudah dilakukan di Kelurahan Birobuli Selatan.

ABSTRACT

BPNT aims to reduce the expenditure level of Beneficiary Families (KPM) by providing balanced nutrition, meeting food needs, improving the accuracy of targeting and timeliness of food aid distribution for KPM, providing choices and control to KPM in meeting food needs and encouraging the achievement of sustainable development goals. This is done by the government to encourage people's retail businesses and Beneficiary Families (KPM) not only to obtain carbohydrates but also protein. The focus of this study is to determine how the South Birobuli Village implements the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. In this research method, the author uses descriptive research with a qualitative approach, namely examining a research object by examining it comprehensively and in-depth. Data collection techniques used in the study of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program in the South Birobuli Village are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the BPNT Program in Birobuli Village has been carried out in general in accordance with the 2018 BPNT Program Guidelines, which began with socialization, registration, and distribution. The Ministry of Social Affairs has no longer provided social assistance in the form of assistance but has also been carried out in Birobuli Village.

PENDAHULUAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT ditujukan untuk mengurangi tingkat pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberi nutrisi seimbang, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kecukupan pangan keluarga penerima manfaat. Namun, ada masalah dengan akurasi penargetan, yang memengaruhi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat (Saputri et al., 2025). Jaminan pangan keluarga adalah kemampuan keluarga dan semua anggotanya kapan pun memperoleh cukup makanan untuk kegiatan dan kehidupan mereka yang sehat (Sitinjak & Sihaloho, 2019). Selain itu, tujuan dari program BPNT adalah untuk meringankan beban masyarakat atas pemenuhan kebutuhan pokok. Program ini memberikan bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan dan untuk membangun sistem perlindungan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu dalam hal pangan dan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Secara jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat (Julianto, 2020).

Implementasi program bantuan menghadapi tantangan yang berbeda, seperti koordinasi di antara para pemangku kepentingan, akurasi penargetan, pencairan tepat waktu, dan peningkatan akses ke pendidikan. Program bantuan telah dikritik karena memasukkan penerima manfaat yang mampu secara finansial, ini menunjukkan bahwa program tidak dapat menargetkan penerima manfaat dengan tepat (Boemiya et al., 2023). Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam struktur kebijakan yang menentukan apakah kebijakan pemerintah dapat diterapkan di lapangan dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan. Implementasi kebijakan harus dilakukan sepenuhnya untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diinginkan (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, seperti BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) di Indonesia, dapat berdampak signifikan terhadap hasil gizi dan ketahanan pangan pada masyarakat yang memasuki usia rentan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, meskipun transfer uang tunai dapat meningkatkan ketahanan pangan dan standar hidup, bantuan pangan langsung dapat menyebabkan peningkatan kualitas makanan dan pola konsumsi yang lebih langsung. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah dalam program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia memberikan kartu elektronik kepada KPM hanya digunakan untuk membayar kebutuhan pangan (Anam et al., 2023). Pengguna hanya dapat membeli bahan pangan di toko bahan pangan di E-Warong yang bekerja sama dengan Bank penyalur (Tangel et al., 2021).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan bahan pangan dengan gizi

seimbang kepada KPM BPNT, Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Di Kelurahan Birobuli Selatan, semua tahapan Program BPNT telah dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018, yaitu dimulai dengan tahapan sosialisasi, registrasi, dan penyaluran. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerja sama dengan staf Kelurahan Birobuli Selatan untuk melaksanakan program BPNT khusus untuk KPM dengan sukses. Dalam komunikasi kebijakan, George Edwards III dalam Winarno mengatakan bahwa informasi tentang kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada implementor, sasaran penerima program, dan pihak yang bersangkutan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan secara efektif dan efisien. Mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik.

Kelurahan Birobuli Selatan terletak di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk setelah Kelurahan Birobuli berpecah menjadi dua, Birobuli Selatan dan Birobuli Utara. Birobuli Selatan memiliki luas 334 hektar dan terdiri dari 32 RT/RW, berbatasan dengan Birobuli Utara di sebelah utara, Kalukubula di sebelah selatan, Sungai Palu di sebelah barat, dan Petobo di sebelah timur. Jumlah penduduk di kelurahan birobuli selatan pada Tahun 2022-2024 yaitu 1.198 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 298 jiwa dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT sebanyak 78 orang.

Bantuan sosial dalam bentuk BPNT yang disalurkan oleh pemerintah di Kelurahan Birobuli Selatan dimulai pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022-2023 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk barang berupa sembako seperti beras, telur, ayam, tempe, tahu, dan minyak goreng. Penerima bantuan dapat memilih sembako apa yang mereka butuhkan dengan maksimal pembelanjaan yang telah diberikan pemerintah Rp. 200.000 per KPM setiap bulan dan hanya dapat digunakan untuk transaksi sembako di E-warong. Jika KPM tidak menukarkannya pada bulan tersebut, nilai bantuan akan tetap disimpan di akun elektronik BPNT. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mendorong usaha eceran rakyat dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya mendapatkan karbohidrat saja tetapi juga protein.

Tahun 2024 Kementrian Sosial (Kemensos) mengubah program BPNT dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan tidak lagi menukarkan menjadi barang sembako di E-warong, dikarenakan bantuan secara tunai dapat memberikan keleluasaan bagi KPM untuk berbelanja barang pokok sesuai dengan kebutuhannya. KPM juga tidak perlu repot belanja di E-warong. Bantuan uang tunai dapat diambil di Kantor Pos dengan nominal yang sama sebesar Rp. 200.000.

Semua tindakan ditujukan untuk mencapai pelaksanaan program, dalam studi implementasi kebijakan publik, tujuan dan sasaran harus diidentifikasi dan diukur. Proses penyaluran bansos diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan pencapaian dan tujuan program (Budiman et al., 2021). Hal ini termasuk dalam konsep manajemen strategi yang harus diterapkan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, implementasi hanya dapat terjadi jika tujuan kebijakan tercapai. 4 indikator Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meliputi Ketepatan sasaran, pada Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merujuk pada sejauh mana program ini berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa prioritas utama bagi penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah,

memiliki tanggungan anak dan orang tua, dan janda. Sosialisasi Program, sebelum masuk program bantuan tentunya dilakukan sosialisasi, pada tahap ini masyarakat diberikan informasi tentang program bantuan sosial BPNT yang diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Proses masyarakat merupakan proses penting dalam menjalankan program. Pelaksanaan BPNT harus mematuhi prinsip-prinsip seperti memberikan pilihan kepada penerima manfaat. Pemantauan Pencapaian, Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. Monitoring adalah tindakan memantau pencapaian pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengidentifikasi masalah yang muncul serta mengambil tindakan sesegera mungkin. Tujuan dari program dukungan sosial ini adalah bagaimana menemukan dan melihat kecocokan antara hasil pernyataan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mengatakan bahwa tujuan dari program BPNT adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memutus mata rantai, serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, untuk mengubah perilaku tidak membantu. BPNT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengurangi beban pengeluaran untuk membeli bahan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendorong tercapainya Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disediakan pemerintah dengan tujuan meringankan beban dengan memenuhi beberapa kebutuhan pangan. Dana bantuan harus digunakan secara khusus untuk membeli makanan (Dayana & Malik, 2023). Tujuan utama program BPNT adalah untuk memberikan bantuan pangan non tunai kepada penerima manfaat yang ditargetkan dengan memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan administrasi yang tepat, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi dan kecukupan pangan Masyarakat (Boemiyal et al., 2023). Tujuan dari program BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi kebutuhan pangan mereka, memberikan nutrisi yang seimbang, meningkatkan efisiensi administrasi dan penargetan, dan memberikan pilihan dan kontrol tentang cara memenuhi kebutuhan pangan untuk memerangi kemiskinan.

Berbagai studi telah menyelidiki pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang menunjukkan keberhasilan dan kesulitan di berbagai wilayah Indonesia. Studi ini menunjukkan bagaimana program berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, seberapa efektif program itu, dan masalah yang dihadapi saat melakukannya. Penelitian oleh (Malbruk & Praloso, 2024) menjelaskan bahwa program BPNT telah mencapai kinerja realisasi tinggi mencapai 99,25% pada tahun 2022, ini menunjukkan pemanfaatan anggaran yang efektif. Studi menunjukkan dampak positif pada kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, meskipun ada masalah seperti daftar penerima manfaat yang ketinggalan zaman dan kurangnya sosialisasi membuat masyarakat kurang paham mekanisme program BPNT yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan secara efektif. Sama dengan penelitian oleh (Saputri et al., 2025) menjelaskan bahwa ada masalah dan hambatan yang dialami seperti penyebaran program semakin sulit karena hambatan sosial-ekonomi, seperti literasi keuangan KPM yang rendah dan masalah teknis infrastruktur yang kurang memadai serta konektivitas internet yang tidak baik. Berbagai penelitian telah menekankan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang menunjukkan tantangan dan manfaat yang signifikan. Meskipun demikian, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan di antara KPM yang ditargetkan. Sedangkan penelitian dari (Firdausi & Hertati, 2022) menjelaskan bahwa di

Desa Glagahan, program bantuan pangan non tunai (BPNT) dianggap tidak optimal secara keseluruhan. Program ini dianggap efisien, terorganisir, bertanggung jawab, dan akurat, tetapi tidak efektif dalam sosialisasi dan pemantauan, yang menyebabkan manfaat yang terbatas bagi penerima manfaat, studi program BPNT di Ponorogo menghadapi masalah yang sama seperti target yang tidak tepat, sosialisasi yang buruk, dan pemantauan yang tidak memadai. Keberhasilan pengentasan kemiskinan bergantung pada peningkatan efektivitas program, pengumpulan data, pendidikan, dan pengoptimalan layanan yang lebih baik (Rahayu & Fitriani, 2023).

Program BPNT telah menunjukkan potensi untuk mengatasi kemiskinan, perbaikan menyeluruh dan strategi yang ditargetkan penting untuk keberhasilannya mencapai tujuan BPNT. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin meneliti kebijakan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Birobuli selatan. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan?

METODE

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang populasi atau kondisi dengan menggunakan alat seperti survei, wawancara, dan studi kasus untuk menunjukkan fenomena yang sebenarnya terjadi (Deckert & Wilson, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan Lokasi ditentukan dengan pertimbangan yang diamati seperti jenis bantuan yang berbeda-beda dan di Kelurahan ini memiliki kawasan perumahan yang cukup padat dan berbagai fungsi tata guna lahan seperti sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Selain itu Lokasi kelurahan yang strategis dengan jaringan jalan yang baik memudahkan akses dalam pengumpulan data. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Kelurahan Birobuli Selatan merupakan Lokasi yang tepat untuk penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam menangani kemiskinan oleh Kementrian Sosial yang dilaksanakan di Kota Palu khususnya Kelurahan Birobuli Selatan, penyaluran BPNT di Kota Palu dimulai sejak Tahun 2022. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan di Kota Palu pada Tahun 2022 sebanyak 105.945 jiwa, pada tahun 2023 angka KPM menurun menjadi 99.451 jiwa. Jumlah KPM di Kelurahan Birobuli Selatan pada Tahun 2022-2024 berjumlah 78 orang pihak Kelurahan Birobuli Selatan tidak mengurangi jumlah KPM dari Tahun 2022-2024 dikarenakan masyarakat memang dalam keadaan membutuhkan bantuan tersebut.

Usia merupakan salah satu faktor penting dalam menganalisis karakteristik penerima Program BPNT. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei di lokasi penelitian, penerima manfaat Program BPNT dikelompokkan ke dalam beberapa rentang usia. Pembagian ini bertujuan untuk mengetahui usia penerima bantuan serta kelompok usia dominan yang menerima manfaat program tersebut. Usia penerima manfaat Program BPNT dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah penerima program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan Berdasarkan Usia

No	Usia KPM	Jumlah KPM
1	25-34 Tahun	13 Orang
2	35-44 Tahun	14 Orang
3	45-54 Tahun	21 Orang
4	55-64 Tahun	20 Orang
5	65 Tahun	10 Orang
Total		78 Orang

Sumber: Kasi Soskem (2025)

kelompok usia di bawah 30 tahun dan di atas 60 tahun memiliki persentase yang relatif kecil, masing-masing hanya sekitar 10%. Ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar penerima BPNT merupakan individu yang secara ekonomi berada dalam usia kerja, namun tetap membutuhkan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menggambarkan kondisi ekonomi penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Status pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas penghasilan serta kemampuan penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Tabel berikut menyajikan jumlah KPM berdasarkan pekerjaan:

Tabel 2. Jumlah penerima program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan KPM	Jumlah KPM
1	URT	29 Orang
2	Padat Karya	36 Orang
3	Buruh bangunan	10 Orang
4	ART	3 Orang
Total		78 Orang

Sumber: Kasi Soskem (2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa penerima BPNT mayoritas berasal dari kalangan pekerja informal dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini mencerminkan bahwa program BPNT memang menyasar kelompok masyarakat rentan ekonomi yang tidak memiliki penghasilan stabil dan memerlukan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang turut memengaruhi kemampuan individu dalam mengakses informasi, pekerjaan, dan program sosial, termasuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan penerima program dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang diselesaikan. Tabel 2 berikut menyajikan tingkat pendidikan penerima Program BPNT:

Tabel 3. Jumlah penerima program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan KPM	Jumlah KPM
1	SD	22 Orang
2	SMP	34 Orang
3	SMA	22 Orang
Total		78 Orang

Sumber: Kasi Soskem (2025)

Hal ini sejalan dengan karakteristik umum kelompok rentan yang menjadi sasaran program bantuan sosial pemerintah, yaitu mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan ekonomi. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali berkorelasi dengan minimnya akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga memperbesar kemungkinan tergantung pada bantuan sosial seperti BPNT

Pada Tahun 2022-2023 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk barang berupa sembako seperti beras, telur, ayam, tempe, tahu, dan minyak goreng. Penerima bantuan dapat memilih sembako apa yang mereka butuhkan dengan maksimal pembelanjaan yang telah diberikan pemerintah Rp. 200.000 per KPM setiap bulan dan hanya dapat digunakan untuk transaksi sembako di E-warong.

Pada Tahun 2024 BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan tidak lagi menerima bantuan sosial dalam bentuk barang sembako, melainkan hanya menerima uang tunai dengan nominal yang sama yaitu Rp. 200.000, dan KPM di Kelurahan Birobuli Selatan mengambil bantuan sosial tersebut tidak lagi di E-warong melainkan di Kantor Pos.

Menurut beberapa KPM yang di wawancarai, bantuan sebesar Rp. 200.00, bisa membantu kebutuhan yang ingin dipenuhi, tetapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rentan waktu satu bulan. Ketika KPM menerima bantuan dalam bentuk barang atau sembako, KPM bisa memilih kebutuhan pangan yang paling dibutuhkan dalam bentuk sembako, dan ketika bantuan diubah menjadi bantuan tunai, KPM memprioritaskan kebutuhan dan fleksibilitas untuk membeli kebutuhan lainnya, KPM menggunakan bantuan secara efektif. Perubahan metode program BPNT ditunjukkan dengan pergeseran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari penyediaan bahan baku menjadi bantuan tunai. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya beli keluarga penerima manfaat, memberi mereka kemampuan untuk memilih makanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan program ini telah meringankan dalam mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung KPM. Ketika harga pasar berubah, fleksibilitas bantuan tunai dapat mengurangi beban penerima manfaat selama pergeseran harga barang di pasaran (Rachman et al., 2018)

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tahapan Program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan telah dilakukan secara umum sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018, yaitu dimulai dengan tahapan sosialisasi, registrasi, dan penyaluran. Perubahan Kemensos sudah tidak lagi memberikan bantuan sosial dalam bentuk barang melainkan uang tunai juga sudah dilakukan di Kelurahan Birobuli Selatan. Dinas Sosial dan staf Kelurahan telah membantu menjalankan program dengan lancar, khususnya untuk KPM. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Sosialisasi

Keberhasilan sosialisasi program BPNT dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, yang meningkatkan pemahaman dan penerimaan penerima. Strategi komunikasi yang efektif secara langsung mempengaruhi penjangkauan program dan keterlibatan masyarakat, yang memastikan bahwa manfaat yang dimaksudkan tercapai. Tim Koordinasi Program BPNT Dinas Sosial menyelenggarakan sosialisasi Program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Kelurahan Birobuli Selatan. Komunikasi yang efektif mendorong penerima untuk menggunakan program dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program BPNT, meskipun ada manfaatnya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan orang tidak mau berpartisipasi, menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif. Sosialisasi ini telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program BPNT 2018, pelaksana memberikan informasi kepada KPM dan sosialisasi dilakukan secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Sosialisasi yang efektif memastikan bahwa penerima manfaat menyadari keberadaan program dan memahami cara mengakses manfaat. Sosialisasi yang efektif memastikan bahwa penerima manfaat mengetahui tentang keberadaan program dan tahu cara mengakses manfaat. Studi menunjukkan bahwa penerima manfaat bingung tentang kelayakan dan penggunaan program, dan kurangnya komunikasi yang efektif menghambat bantuan masyarakat yang tepat waktu (Firdausi & Hertati, 2022). Kepercayaan dan partisipasi dapat meningkat ketika masyarakat lokal terlibat dalam proses sosialisasi. Komunikasi langsung dari pelaksana dapat membantu memperjelas proses program dan tujuan (Nabillang & Stiawati, 2023).

Registrasi

Registrasi yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan sosialisasi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan memastikan transparansi, akurasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Proses registrasi yang terstruktur dengan baik tidak hanya mengidentifikasi penerima manfaat yang memenuhi syarat tetapi juga meningkatkan kredibilitas program dan efisiensi operasional. Pada tahap registrasi di Kelurahan Birobuli Selatan, hanya KPM BPNT non PKH yang dapat membuka rekening, sedangkan KPM yang mendapatkan Program PKH tidak perlu membuka rekening lagi untuk mendapatkan kartu kombo karena kartu kombo yang digunakan untuk mengambil bantuan Program BPNT dan PKH sama. Keberhasilan program BPNT adalah memastikan penargetan penerima manfaat dengan akurat dan meningkatkan kesadaran partisipasi yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pemberian layanan yang lebih baik di masyarakat. Untuk menjamin bahwa bantuan diberikan hanya kepada yang paling membutuhkan, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sosial ekonomi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah (Faridah et al., 2023).

Penyaluran

Melaksanakan penyaluran bantuan melalui program BPNT secara signifikan meningkatkan pemahaman penerima manfaatnya, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan asupan gizi. Pergeseran dari bantuan barang ke sistem tunai BPNT telah menunjukkan perubahan dalam asupan kalori harian penerima manfaat. Penyebaran program BPNT baru-baru ini bergeser dari sistem pembelian makanan ke pencairan tunai langsung melalui ATM. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyelarasan dengan tujuan awal kebijakan dan mengatasi masalah dalam menentukan penerima manfaat dan akurasi data (Perdana et al., 2023). Penyaluran disiplin untuk

memberikan bantuan tepat waktu. Selain itu, tidak pernah ada antrean yang rusuh atau berebut karena agen e-Warong melayani masyarakat dengan baik. Hasil dari wawancara dengan agen e-Warong menunjukkan bahwa agen dan e-Warong selalu mengajarkan KPM cara menggunakan dan menjaga PIN Kartu Kombo aman setiap kali melakukan transaksi. Ini dilakukan karena beberapa KPM masih kesulitan melakukan pembayaran di e-Warong. Meskipun ada beberapa hambatan, BPNT telah meningkatkan ketahanan pangan KPM dan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Penyaluran program BPNT memenuhi beberapa tujuan yaitu, Akurasi Administrasi, Tepat Waktu, Penargetan KPM, Akurasi Manfaat, dan Akurasi Kualitas (Dilapanga & Mamonto, 2023).

BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan berhasil mengurangi antrian, meningkatkan kecepatan pencairan, mengurangi masalah teknis di lapangan, dan memperbaiki jumlah dan waktu penyaluran bantuan dengan tepat waktu maka pelaksanaan tahapan program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan secara umum di lapangan telah sesuai dengan buku pedoman program BPNT 2018, yaitu diawali tahapan sosialisasi, registrasi, sampai pada tahapan penyaluran. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Staf Kelurahan Birobuli Selatan, dalam terlaksananya program BPNT dengan lancar yang dikhususkan kepada KPM. Standar operasional prosedur tersebut telah diterapkan dengan baik melihat jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Birobuli Selatan yang sudah terdaftar serta pelaksanaan penyaluran bantuan melalui e-warong dan berubah pengambilan melalui Kantor Pos secara tunai telah dilakukan sesuai prosedur BPNT. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan sudah sesuai dengan tujuan dan pedoman BPNT.

Beberapa komponen yang mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan, yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi adalah faktor pendukung utama dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran. Faktor pendukung kedua adalah lokasi e-warung yang strategis, karena lokasi e-warung dan tempat tinggal KPM sangat dekat dan mudah dijangkau dan kebebasan KPM untuk memilih komoditi bahan pangannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya karena program ini memiliki enam komoditi bahan pangan.

Program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan pangan non tunai, dianggap berhasil karena beberapa faktor penting. Ini termasuk pendekatan implementasi yang baik, partisipasi masyarakat, sosialisasi yang baik, dan kemampuan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Upaya mengatasi ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, Program BPNT telah menunjukkan banyak keberhasilan. Melihat pada hasil dan pembahasan tentang implementasi program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan yang dipaparkan di atas, maka pada penerapan karakteristik pelaksanaan program BPNT memiliki karakter disiplin, baik, serta selalu ramah kepada setiap KPM. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung program BPNT dengan melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin sehingga tercapainya tujuan BPNT.

Saran untuk dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan serta memaksimalkan pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Birobuli Selatan, yaitu mempertahankan ketepatan sasaran yang menjadi tujuan dari program BPNT, mempertahankan serta selalu menciptakan

kondisi lingkungan sosial yang mendukung untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik, agar tetap bertahan dan berhasil, evaluasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Rahmiati, R., Paradila, D., Mardainis, M., & Machdalena, M. (2023). Application Of Naïve Bayes Algorithm For Non-Cash Food Assistance Recipients In Kampar Regency. *Sinkron : Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 8(1), 433–441. <https://doi.org/10.33395/Sinkron.V8i1.12032>
- Boemiya, H., Wahyuliyana, I., Mustiko, B., & Susila Adi Irawan, L. (2023). E C H N I U. *Technium Social Sciences Journal*, 47, 379–397.
- Dayana, S. A., & Malik, Z. A. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Sosial Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai. <https://doi.org/10.29313/Jrps.V2i1.2027>
- Deckert, J. L., & Wilson, M. (2023). *Descriptive Research Methods* (Pp. 153–165). University Press Of Florida. <https://doi.org/10.5744/Florida/9780813069548.003.0011>
- Dilapanga, A. R., & Mamonto, F. H. (2023). The Implementation Of Non-Cash Food Assistance Program (Bpnt): A Case Study Of Apela Satu Sub-District, Ranowulu District, Bitung City. *Technium Social Sciences Journal*, 45, 60–70. <https://doi.org/10.47577/Tssj.V45i1.9112>
- Faridah, F., Rahayu, N., & Forensa, D. (2023). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Metode E-Warung Dalam Penanggulangan Kemiskinan. <https://doi.org/10.59407/Jogapa.V1i1.326>
- Firdausi, D., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V22i2.2323>
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. In *Qawwam : The Leader's Writing* (Vol. 1, Issue 1).
- Mabruk, H., & Prasajo, E. (2024). Evaluation Of Performance Of The Non-Cash Food Assistance (Bpnt) Program In Meeting The Basic Needs Of Poor And Vulnerable Communities. *Journal Research Of Social Science, Economics, And Management*, 3(11), 1996–2004. <https://doi.org/10.59141/Jrssem.V3i12.677>
- Nabillang, Q., & Stiawati, T. (2023). Implementation Of The Non-Cash Food Assistance (Bpnt) Program In Curug Sawyer Pandeglang Village. *Deleted Journal*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.55651/Niagara.V15i1.19>
- Perdana, Y. K., Akbar, D., & Pratama, R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs). *Doktrin*, 1(3), 288–300. <https://doi.org/10.59581/Doktrin.V1i3.1060>
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, Nfn. (2018). Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt). 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.21082/Akp.V16n1.2018.1-18>
- Rahayu, P., & Fitriani, H. (2023). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo. *Deleted Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/Niqosiya.V3i1.1758>
- Salsmito, C., & Nalwalngsalri, E. R. (2019). Implementalsi Progralm Kelualrgal Halralpaln Dallalm Upalyal Mengentalskaln Kemiskinaln Di Kotal Baltu. *Jpsi (Journall Of Public Sector Innovaltions)*, 3(2), 68-74.
- Saputri, A., Hamid, A., Sosial, I. K., Ilmu, F., & Muhammadiyah, U. (2025a). Tantangan Pelaksanaan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Sitinjalk, W., & Sihalloho, Al. N. (2019). The Handling Of Non-Cash Food Assistance (Bpnt) And Its Effects On Food Resistance To Beneficiary Families (Kpm) In 2018-2019-Case Study: Sialitir Sitallalri District, Pematangsialitir City, Indonesia. European Journal Of Social Sciences Studies.

Talngel, N., Malmonto, F., & Kalndouw, S. R. (2021). Implementation Of The Distribution Of Welfare Rice Social Assistance For The Poor Southeast Minalhasal. Technium Soc. Sci. J., 21, 49.